



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini peneliti membahas penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya, serta menelaah kajian-kajian penelitian terdahulu yang memiliki dasar yang sama yaitu mengenai studi kasus program berita dalam media massa televisi yang juga berkaitan dengan penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Penelitian pertama oleh Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Venia Bernadetha, yang membahas tentang Penerapan Kode Etik Pemberitaan Kasus Kecelakaan Di Surat Kabar Pos Kota dan Warta Kota (Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kecelakaan Di Tol Jagorawi Pada Surat Kabar Harian Pos Kota dan Warta Kota Periode 09 September Sampai 29 November 2013). Penelitian terdahulu yang kedua, oleh Mahasiswa Universitas Indonesia, Sarah Sayekti, yang membahas tentang Tinjauan Kode Etik Jurnalistik Universal Dalam Berita (Studi Kasus : Berita Lintas Lima TPI).

Berikut ini penyajian dalam bentuk tabel penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian	Rumusan Masalah	Konsep dan Teori	Metodologi	Teknik Pengumpulan Data
Penelitian 1	Bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) dalam pemberitaan kecelakaan di Tol Jagorawi dalam surat kabar harian Pos kota dan Warta Kota dalam periode 9 September 2013 sampai 14 November 2013?	- Teori Etika - Kode Etik Jurnalistik - Konsep Berita	Analisis Isi, Kuantitatif	Uji Reliabilitas dan Analisis Data (Artikel dalam Surat Kabar)
Penelitian 2	Apakah berita Lintas Lima TPI beracuan dan mematuhi poin-poin Kode Etik Jurnalistik Universal? Apakah dalam manajemen pemberitaanya TPI	- Televisi dan Masyarakat - Aspek Berita dalam Televisi - Rating - Kode Etik Jurnalistik - Etika dalam Perspektif	Studi Kasus, Kualitatif	Wawancara dan Observasi

	mengacu pada Kode Etika Jurnalistik Universal tersebut?	Konstruksionis -Etika dalam Proses Produksi Berita -Kode Etik Jurnalistik Universal -Pemetaan Kasus Etika di Media Massa.		
--	---	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ada, terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu yang pertama dengan penelitian sekarang yaitu membahas bagaimana penerapan aturan atau pedoman yang dilakukan untuk mengatur suatu media dalam penyajian berita yang disampaikan kepada masyarakat. Perbedaan terdapat dari penelitian terdahulu yang pertama yaitu, pedoman yang digunakan berbeda, peneliti sebelumnya menggunakan Kode Etik Jurnalistik, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan P3SPS. Metodologi yang berbeda dan juga media yang digunakan peneliti sekarang yaitu media televisi, khususnya program berita di stasiun televisi swasta RCTI, Seputar Indonesia Malam. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan media cetak, yaitu surat kabar Pos Kota dan Warta Kota Periode 09 September- 29 November 2013. Untuk metodologi penelitian

terdahulu pertama menggunakan Analisis isi, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metodologi Studi Kasus.

Persamaan peneliti sekarang dengan penelitian kedua adalah, penggunaan metodologi yang sama, yaitu Studi Kasus. Media televisi khususnya program berita menjadi kesamaan dalam penelitian kedua dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Namun, terdapat perbedaannya dalam pembahasan mengenai pedoman aturan bagi media yang digunakan. Penelitian kedua membahas Kode Etik Jurnalistik secara universal, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

2.2. Teori dan Konsep

2.2.1 Televisi

Media massa menjadi suatu istilah yang mulai dipergunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas (Soehadi, 1978, h. 37). Media massa merupakan unsur yang paling penting dalam sistem pers, yang dimana media massa juga memiliki fungsi untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.

Oetama (2001, h.42) menjelaskan berbagai keinginan, aspirasi, pendapat, serta sikap perasaan manusia dapat disebarluaskan

melalui media massa. Televisi salah satu bagian dari media massa yang saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat (Morissan, 2008, h.1). Secara garis besar televisi merupakan suatu media yang menampilkan siaran berupa gambar dan suara dari jarak jauh, dan media televisi menjadi sarana hiburan, pengetahuan serta sumber informasi yang dipilih masyarakat luas.

Kebebasan aliran informasi adalah hal yang menentukan kredibilitas suatu stasiun televisi, dimana suatu informasi menjadi hal yang utama dan penting untuk disajikan kepada masyarakat. Televisi merupakan salah satu bentuk media yang berfungsi sebagai alat komunikasi massa, Karyanti (2005, h.03) menegaskan, bahwa televisi adalah media yang dapat mendominasi komunikasi massa, karena sifatnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak. Media ini mempunyai kelebihan dari media massa lainnya yaitu yang bersifat audio visual, dapat menggambarkan kenyataan dan langsung dapat menyajikan peristiwa yang sedang terjadi.

Effendy (2002, h.21) mengatakan media televisi merupakan media yang memiliki bentuk komunikasi secara satu arah, pesannya yang bersifat umum, masyarakat yang menggunakan media televisi memberikan dampak keserempakan serta bentuk komunikasinya bersifat heterogen. Kelebihan dari media televisi sendiri terletak pada

kekuatannya yang menguasai jarak dan ruang, sasaran yang dicapai cukup besar dan cakupannya sangat luas.

Menurut Ks, (2009, h.23-24) Karakteristik televisi sendiri yaitu :

1. Media pandang dengar (audio – visual)

Televisi sebagai media pandang sekaligus media dengar. Televisi berbeda dengan media lainnya. Orang memandang gambar yang ditayangkan televisi, sekaligus mendengar atau mencerna narasi dari naskah gambar tersebut.

2. Mengutamakan Gambar

Kekuatan televisi terletak pada gambar. dalam hal ini yang dimaksudkan adalah, gambar yang hidup, membuat televisi menjadi lebih menarik untuk mendukung narasi dan naskah berita yang disampaikan.

3. Mengutamakan kecepatan

Kecepatan menjadi salah satu unsur yang menjadikan berita televisi bernilai. Berita yang paling menonjol atau menarik dalam rentang waktu tertentu akan ditayangkan paling awal dan cepat oleh televisi.

4. Bersifat sekilas

Berita televisi bersifat sekilas, tidak mendalam dan dengan durasi yang tayang terbatas.

5. Bersifat satu arah

Penonton tidak dapat memberikan respon balik terhadap berita televisi yang ditayangkan, kecuali pada beberapa program interaktif. Televisi

bersifat satu arah dan penonton memiliki kesempatan untuk memahami berita televisi.

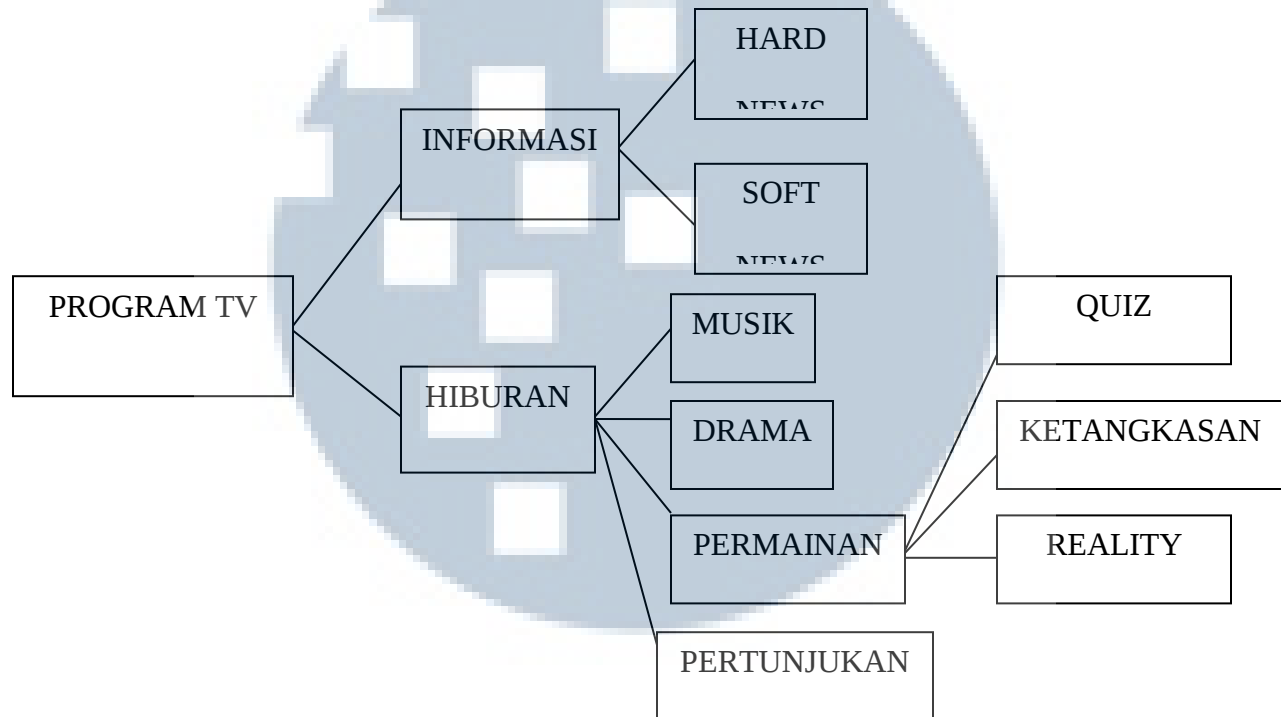
6. Daya jangkau luas

Televisi menjangkau segala lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi. Siaran atau berita televisi harus dapat menjangkau status sosial ekonomi masyarakat dan masuk ke berbagai strata sosial.

Soenarto (2007, h.9) mengatakan, program televisi adalah bahan yang telah disusun dalam suatu format dengan unsur video yang didukung dengan audio, secara teknis memenuhi syarat layak siar, serta memenuhi standar estetik dan artistik yang berlaku.

Program siaran memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam (Morrison, 2008, h.210). Undang-Undang menggunakan istilah siaran yang didefinisikan sebagai satu rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Berikut ini adalah jenis program yang ditayangkan di televisi :

Gambar 2.2.1 Jenis Program Televisi (Morrison, 2008, h.225)



Program informasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*). Berita keras adalah informasi yang penting dan harus disiarkan oleh media penyiaran, karena sifatnya harus segera ditayangkan (Morrison, 2008, h.219). Sebagai contoh, *Breaking News* terkait pemberitaan terkini, di Tangerang Selatan kasus mutilasi seorang perempuan yang sedang mengandung. Sedangkan berita lunak adalah informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam, namun tidak terikat waktu dalam penayangannya (Morrison, 2008, h.221).

2.2.2 Konsep Berita

Berita merupakan suatu elemen penting dalam suatu media penyiaran. Berita televisi dapat dikatakan telah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Suatu berita menjadi layak apabila akurat, lengkap, adil dan berimbang, objektif, ringkas, dan jelas (Hikmat dan Purnama, 2005, h.48). Masyarakat saat ini mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mendapatkan informasi yang benar.

Berita dalam industri penyiaran adalah program yang seharusnya ada dengan tujuan menjadi media bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta yang informatif. Sebuah program berita dituntut untuk menyajikan berita atau informasi yang akurat dan benar, karena kredibilitas suatu program berita dapat terlihat dari berita yang disajikan untuk masyarakat. Ks (2009, h.19) menjelaskan bahwa definisi berita televisi adalah, laporan peristiwa atau pendapat yang aktual, menarik, dan berguna, yang disiarkan dengan gambar melalui media televisi.

Dalam pembentukan berita terdapat faktor-faktor pemilihan dan pengemasan berita. Dewabrata (2006, h.20) menjelaskan bahwa pemilihan berita adalah sebagai berikut:

1. Berita yang dapat disampaikan dengan tepat waktu, penting dan mengandung unsur yang menarik.

2. Berita yang dipilih, dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan baik.

Kekuatan suatu berita terdapat pada gambar yang didapat, berita yang bagus tidak akan menjadi berita televisi apabila tidak memiliki gambar. Sebaliknya berita seburuk apapun, seperti halnya berita bom di Sarinah, Jakarta yang sempat membuat warga sekitar resah, akan menjadi berita televisi yang baik apabila memiliki gambar yang baik juga. Gambar menjadikan suatu peristiwa memiliki nilai berita karena, berita yang disampaikan menjadi menarik dan mengandung unsur faktual.

Menurut Ks (2009, h.20-22) ada beberapa nilai-nilai berita dalam konteks berita televisi yaitu:

1. Aktual (timeliness)

Aktualitas berita televisi dihitung berdasarkan waktu yang lebih ketat dibanding media cetak. Aktualitas berita televisi adalah per detik, yang dimana bersifat simbolis menggambarkan ketatnya aktualitas berita televisi. *Breaking news, live report, headline news* atau laporan terkini menjadi sarana untuk mencapai nilai aktualitas suatu berita televisi.

2. Berguna (impact)

Berita televisi harus berguna untuk memberi pengaruh bagi penonton dengan kekuatan gambar dan informasi yang akurat.

Berita televisi mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan berita di media cetak.

3. Menonjol (prominent)

Berita televisi yang menonjol dapat menarik perhatian penonton. Kembali kepada kekuatan media televisi yaitu gambar. Sebagai contoh, berita televisi dan berita media cetak sama-sama menyajikan berita tentang pengusuran kalijodo, berita televisi akan lebih menonjol dibandingkan berita media cetak karena, kekuatan media televisi yang dapat menayangkan secara audio dan visual.

4. Kedekatan (proximity)

Sebagai contoh, berita kenaikan harga bahan bakar minyak di Indonesia akan jauh lebih menarik bagi penonton di Indonesia, dibandingkan dengan berita serangan bom bunuh diri di Yaman. Peristiwa yang terjadi memiliki hubungan kedekatan dengan penonton.

5. Konflik (conflict)

Adanya konflik yang terjadi dalam suatu peristiwa yang menarik banyak perhatian penonton, misalnya, konflik antar kendaraan umum, antara supir taksi *bluebird* dengan *driver* ojek *online*, ditambah dengan adanya gambar yang disajikan akan menjadi lebih menarik.

6. Menjadi pusat pembicaraan (currency)

Berita televisi tidak selalu memberitakan agenda publik, berita televisi dapat menjadi pelopor dalam menyajikan berita yang telah luput dari pembicaraan publik untuk menjadi berita televisi yang menarik. Mengangkat berita yang sedang menjadi pembicaraan publik dan menyentuh kedekatan dengan publik.

7. Mengandung unsur manusiawi (human interest)

Berita yang mengandung unsur manusiawi, dimana berita yang disampaikan masuk akal dan dapat dipahami. Misalnya mengenai dampak peristiwa atau suatu kejadian tersebut terhadap manusia.

Keberhasilan pemberitaan televisi bergantung pada proses kerja tim redaksional yang dimiliki. Seorang redaktur menentukan apa yang harus diliput, kemudian seorang reporter mencari dan mengumpulkan hal-hal yang diperlukan. Dalam tahapan menyusun berita untuk televisi, Hikmat dan Purnama (2005, h.71) menegaskan untuk membiasakan menyusun suatu perencanaan tentang apa yang akan dikerjakan, yang berisikan susunan daftar narasumber yang akan dihubungi, ringkasan peristiwa terkait, juga objek liputan.

Bagian redaksi suatu program berita di televisi tentu memiliki dapur redaksi, dimana Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana, Koordinator Liputan, dan Reporter, mengadakan rapat redaksi untuk

menentukan berita apa saja yang akan disiarkan di televisi pada program beritanya (Hikmat dan Purnama, 2005, h.72). Penilaian layak atau tidaknya suatu berita yang akan dimuat berdasarkan pada nilai berita. Banyaknya unsur nilai berita yang terdapat, maka semakin tinggi nilai kelayakan berita tersebut.

2.2.3 Teori Etika

Etika memiliki sifat dasar yaitu krisis, tidak pernah puas atas jawaban-jawaban yang ada dan terus mencari tahu. Hal ini karena etika merupakan teori yang menjelaskan bahwa suatu tindakan manusia dan kewajiban-kewajiban manusia. Mufid (2009, h.30) mengatakan, etika adalah aturan perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan dapat menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.

Menurut Muhamad Mufid (2005, h.59) beberapa hal tugas dari etika, yaitu:

1. Untuk mempersoalkan norma yang dianggap berlaku. Diselidikinya apakah dasar suatu norma itu dan apakah dasar itu membenarkan ketaatan yang dituntut oleh norma itu terhadap norma yang dapat berlaku.
2. Etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya. Artinya norma yang tidak dapat mempertahankan diri dari pertanyaan kritis dengan sendirinya akan kehilangan haknya

3. Etika mempersoalkan pula setiap lembaga seperti orang tua, sekolah, Negara, dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati.
4. Etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap rasional terhadap semua norma.
5. Etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambingkan oleh norma-norma yang ada

Beberapa poin tersebut menjelaskan bahwa etika adalah dimana peraturan yang dibuat dan diterapkan dari suatu kelompok sosial untuk menilai baik buruknya sikap seseorang. Etika memberikan batasan maupun standar yang dapat mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosial itu sendiri. Etika dapat membantu manusia untuk mengambil sikap terhadap semua norma dari luar dan dari dalam.

K. Bertens (2007, h.04) mengartikan etika sebagai nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah lakunya dan etika sebagai suatu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau adat kebiasaan. Menurut K. Bertens (2007, h.233) teori-teori etika dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:

1) Teori Teleologi

Teleologi berasal dari akar kata Yunani yaitu telos, yang berarti suatu akhir, tujuan, maksud, dan logos, Teleologi adalah suatu ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian

menuju pada tujuan tertentu. Tujuan, hasil, sasaran atau akibat bisa dilihat dari dua segi, yaitu :

- a. Dilihat dari sudut apa hasil, sasaran atau akibat tersebut
Dilihat dari sudut apa, dikenal ada dua versi teleologi, yaitu hedonisme yang berarti kenikmatan dan eudaimonisme yang berarti kebahagiaan.
- b. Dilihat dari sudut untuk siapa hasil, sasaran atau akibat tersebut. Jika dilihat dari sudut untuk siapa hasil, sasaran atau akibat tersebut, maka hedonism dan eudaimonisme tergolong egois sehingga disebut juga egoism etis.

2) Teori Deontologi (Etika Kewajiban)

Etika deontologi adalah sebuah istilah yang berasal dari kata Yunani 'deon' yang berarti kewajiban dan 'logos' berarti ilmu atau teori. Teori deontologi menilai suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk dilakukan.

Perilaku para pekerja media dalam menyajikan berita dianggap dapat mengetahui baik buruknya suatu berita untuk

disampaikan kepada khalayak, dalam artian para pekerja media mengetahui aturan penyiaran yang berlaku dalam konten suatu berita. Teori deontologi memiliki definisi suatu tindakan baik atau buruk, tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan suatu kewajiban, dimana para pekerja media dituntut untuk menjalankan suatu tindakan dalam melakukan produksi berita baik buruknya menurut para pekerja media harus disesuaikan dengan suatu kewajiban yaitu mematuhi aturan penyiaran yang berlaku, Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS).

2.2.4 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran (P3SPS)

Dalam menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Dari beberapa aturan yang terkait dalam dunia penyiaran, Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran atau yang lebih dikenal sebagai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), menjadi salah satu aturan atau batasan dalam dunia penyiaran bagi pemilik stasiun, tim program dan pengisi program.

P3SPS dibagi ke dalam dua bagian, yaitu Pedoman Perilaku Siaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dengan jumlah keseluruhan pasal 94 dari BAB I hingga XXXII (P3SPS, 2012). Pedoman Perilaku Penyiaran dengan Standar Program Siaran memiliki perbedaan dalam sasaran bagi setiap pasal yang ditentukan KPI. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) lebih memusatkan kepada lembaga penyiarannya, isi dari P3 sendiri mengarahkan aturan kepada masalah penyiaran, bagaimana cara mendapatkan informasi, dan bagaimana dalam menyajikan suatu berita.

Untuk Standar Program Siaran (SPS), aturan yang mengarah kepada isi dari suatu siaran program yang dibuat oleh lembaga penyiaran. Program siaran yang dimiliki stasiun televisi menjadi tolak ukur kesuksesan suatu lembaga penyiaran, untuk mengantisipasi pelanggaran dalam isi siaran, KPI membuat Standar Program Siaran (SPS).

Pada dasarnya KPI memiliki prinsip penyajian yang adil, jujur dan berimbang seperti yang dikehendaki dalam Undang-Undang penyiaran, namun melihat keadaan pers di Indonesia saat ini kurang memperhatikan Undang-Undang Penyiaran yang ada. Persaingan antar media massa membuat kerja wartawan meninggalkan aspek-

aspek profesionalitas dan etika. Pelanggaran banyak dilakukan berupa kesalahan data, gambar yang tidak sesuai hingga pemberitaan yang tidak berimbang akibat persaingan media yang ada saat ini.

Bedasarkan data dari situs resmi KPI, terdapat pasal yang didapati banyak dilanggar oleh program berita :

a. PRINSIP-PRINSIP JURNALISTIK , PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN (P3)
Bagian Pertama , Umum

Pasal 22

(1) Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen.

(2) Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistik, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul.

(3) Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

(4) Lembaga penyiaran wajib menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik.

(5) Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.

b. STANDAR PROGRAM SIARAN (SPS)
Bagian Satu, Prinsip-Prinsip Jurnalistik

Pasal 40

Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik sebagai berikut:

a. akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan;

b. tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan/atau cabul;

c. menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/ atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman; dan

d. Melakukan ralat atas informasi yang tidak akurat dengan cara :

1) disiarkan segera dalam program lain berikutnya dalam jangka waktu kurang dari 24 jam setelah diketahui terdapat kekeliruan, kesalahan, dan/atau terjadi sanggahan atas berita atau isi siaran;

2) mendapatkan perlakuan utama dan setara; dan

3) mengulang menyiarkan ralat tersebut pada kesempatan pertama dalam program yang sama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban serta peranannya, media televisi yang memiliki program berita dapat menghormati pedoman yang berlaku dalam penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik memperoleh informasi yang benar, para penyaji berita memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan profesionalisme.

2.2.5 Teori Konstruksi Realitas Sosial

Berger dan Luckman (Bungin, 2008, h.14) menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak manusia sendiri. Pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Berger dan Luckman (Bungin, 2008, h.5) mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan

masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui internalisasi, eksternalisasi dan objektivikasi.

Proses dialektis tersebut mempunyai tiga tahapan, Berger dan Luckman (Bungin, 2008, h.6-7) :

1. Internalisasi

Proses internalisasi merupakan penyerapan dunia sosial ke dalam suatu individu dan dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat, kemudian dibentuk dan dikonstruksi. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas, setiap orang yang mempunyai pengalaman, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.

2. Eksternalisasi,

Usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Hal ini menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Manusia berusaha menangkap dirinya, dan menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.

3. Objektivasi

Hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil dari eksternalisasi kebudayaan itu misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya atau kebudayaan non-materil dalam bentuk bahasa. Baik alat tadi maupun bahasa adalah kegiatan eksternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari kegiatan manusia. Setelah dihasilkan, baik benda atau bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang objektif. Realitas objektif berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan, ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang.



2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3 Konsep Pemikiran

